

PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN PENGANGKATAN ANAK (DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG's))

ABSTRAK

Oleh Garneta Rizka Camilla

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memindahkan hak dan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada orang tua angkat melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih banyak terjadi pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, seperti pada kasus Bilqis dan berbagai kasus lainnya, yang dilakukan secara informal bahkan disertai praktik pemalsuan identitas dan penyamaran sebagai adopsi. Pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang benar menyebabkan anak kehilangan kepastian status hukum, identitas, hak waris, serta akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, sehingga menempatkan anak dalam situasi yang rentan terhadap kekerasan, penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian difokuskan pada penerapan norma hukum positif mengenai pengangkatan anak dan kaitannya dengan perlindungan hak keperdataan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan PP 54 Tahun 2007 dan Permensos 110 Tahun 2009. Ketidadaan penetapan menghilangkan fungsi verifikasi negara sehingga anak tidak tercatat dalam sistem hukum, yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar dan bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan SDGs. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi anak angkat.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Hak Keperdataan Anak, Perlindungan Anak.

PROTECTION OF CIVIL RIGHTS IN CHILD ADOPTION (FROM THE PERSPECTIVE OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs))

ABSTRACT

BY Garneta Rizka Camilla

Adoption is a legal act that transfers the rights and responsibilities of child care from biological parents or lawful guardians to adoptive parents through procedures established by statutory regulations. In practice, many adoption cases are still carried out without a court decree, as seen in the Bilqis case and various similar cases, often conducted informally and even involving identity falsification disguised as legal adoption. Adoption conducted without proper legal procedures results in the loss of legal status, identity, inheritance rights, and access to education, health services, and social security for the child, thereby placing them in a vulnerable position at risk of violence, neglect, exploitation, and even trafficking. This study employs a normative juridical method by examining secondary data such as statutory regulations, legal theories, and scholarly opinions. The research focuses on the application of positive legal norms concerning adoption and their relation to the protection of the civil rights of adopted children. The findings indicate that adoption carried out without a court decree is legally invalid, as it contradicts Government Regulation No. 54 of 2007 and Ministerial Regulation No. 110 of 2009. The absence of a court decree eliminates the state's verification function, resulting in the child not being recorded in the legal system, which leads to the loss of fundamental rights and contradicts the principle of the best interests of the child as well as the goals of the SDGs. Therefore, strengthening law enforcement and increasing public awareness are essential to ensuring legal certainty and maximum protection for adopted children.

Keywords: Adoption, Court Decree, Civil Rights of the Child, Child Protection.